

# PERAN DOSEN PROGRAM STUDI PPKN DALAM MENGEMBANGKAN BUDAYA DEMOKRASI PANCASILA DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

Fety Novianty<sup>1</sup>, Syarif Firmansyah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi PPKN Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Pontianak  
Jl. Ampera Nomor 88 Pontianak-78116, Telepon (0561) 748219 Fax. (0561) 6589855

<sup>1</sup>email: putrihanza96@yahoo.co.id

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran dosen program studi PPKn dalam mengembangkan budaya demokrasi pancasila dalam pemilu serentak tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, hasil observasi dan dokumen. Proses pengolahan data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran dosen dalam mengembangkan budaya demokrasi pancasila pada mahasiswa Program Studi PPKn dikukan dengan; (1) memberikan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya demokrasi pancasila dengan cara penguatan nilai-nilai demokrasi pancasila dalam kegiatan pembelajaran di kelas dengan menciptakan suasana kelas yang demokratis; (2) mengembangkan sikap kebebasan mengemukakan pendapat; (4) mengembangkan sikap kebebasan untuk berpartisipasi; (5) mengembangkan sikap toleransi.

**Kata kunci:** Budaya Demokrasi Pancasila, Pemilu Serentak

## Abstract

*This study aims to describe the role of the PPKn study program lecturers in developing the Pancasila democratic culture in the simultaneous elections in 2019. The research method used was qualitative research. Data sources in this study are the results of interviews, observations and documents. The data processing is done by collecting data, reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results showed that the role of lecturers in developing the Pancasila democracy culture among PPKn Study Program students was stated by; (1) providing knowledge and understanding of the importance of Pancasila democracy by strengthening the values of Pancasila democracy in classroom learning activities by creating a democratic classroom atmosphere; (2) developing an attitude of freedom of expression; (4) developing an attitude of freedom to participate; (5) develop tolerance.*

**Keywords:** Pancasila Democracy Culture, Simultaneous Elections

## PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) di Negara Indonesia merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, hal tersebut sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 1 ayat (1) bahwa pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu disamping sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, juga sebagai sarana dalam menyeleksi kader bangsa. Kader bangsa dipilih untuk dijadikan sebagai pemimpin yang diberikan kewenangan guna menentukan alternatif kebijakan umum berdasarkan aspirasi rakyat.

*Recruitment* calon pemimpin yang dilakukan melalui pemilu diharapkan mampu menjaring pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat, dan proses yang aspiratif ini merupakan implementasi sekaligus penguatan dalam negara demokratis. Proses *recruitment*

calon pemimpin yang membawa aspirasi rakyat tersebut tentu akan memberikan arti penting bagi pelaksanaan demokrasi di sebuah Negara. Dimana pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tujuan untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan baik di eksekutif (pemerintah) maupun legislatif, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat serta dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Pada tahun 2018 dan 2019 menjadi tahun politik bangsa Indonesia. Tanggal 27 Juni mendatang, rakyat Indonesia dari 171 kota, kabupaten, dan provinsi akan menghadapi pemilihan kepala daerah serentak. Tahun depan pun, seluruh masyarakat Indonesia akan memilih pemimpin dan para wakilnya di parlemen. Namun, sayangnya dunia politik hari ini masih saja dipenuhi dengan kotoran berupa cacian, makian, hinaan, hingga kampanye hitam. Rasanya, kurang afdal jika seseorang yang ingin dipandang baik, tanpa yang lain buruk. Hal ini memperkeruh jalinan persaudaraan yang selama ini begitu kuat.

Dalam tulisannya di *Kompas* edisi 30 Juni 1977 yang dimasukkan dalam buku *Kaleidoskop Politik di Indonesia Jilid 1*, KH Saifuddin Zuhri menulis demokrasi Pancasila hendaklah diartikan sebagai wujud pelaksanaan Pancasila dalam politik, dalam ekonomi, dalam sosial dan dalam budaya. Atau Pancasila dalam wujud demokrasi dalam praktek. Dalam arti lain, Menteri Agama kesepuluh itu menyatakan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus teraplikasikan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada segala aspeknya. Lebih lanjut, Kiai Saifuddin menjelaskan bahwa demokrasi Pancasila merupakan satu kesatuan makna yang tak terpisahkan. Keduanya sudah menjadi satu kata majemuk baru.

Kata Pancasila dalam kata majemuk itu bukanlah embel-embel, akan tetapi dua kata Demokrasi dan Pancasila yang menjadi satu pengertian yang tak terpisahkan," tulis kiai yang menjabat Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada usia 35 tahun itu dalam buku *Kaleidoskop Politik Indonesia Jilid 1*. Padahal, kalau saja kita ingat sila pertama, maka mestinya kita mengerti nama Tuhan yang sedang dipertaruhkan. Artinya, kita harusnya tidak berani melangkahi hukum-hukum yang telah digariskan Tuhan demi tujuan yang ingin dicapai. Sebab, Kiai Saifuddin menegaskan bahwa demokrasi (Pancasila) itu tidak akan menghalalkan semua jalan dan semua cara untuk mencapai tujuan. Hukum Tuhan telah menetapkan di samping yang halal, masih amat banyak yang haram.

Partisipasi politik masyarakat sangat membantu berkembangnya budaya politik dalam suatu negara. Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik, hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah

digariskan oleh para pemimpinnya. Sebab, kalau ini yang terjadi, maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

Demokrasi hanya merupakan media, yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kalau demokrasi ditegakkan, dengan tingginya partisipasi rakyat dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya, maka masyarakat adil dan makmur bisa terwujud. Paling tidak ada tiga syarat minimum yang harus dimiliki oleh sebuah rezim yang mengaku demokratis. *Pertama*, adanya keterwakilan rakyat secara nyata dalam berbagai proses pengambilan keputusan ekonomi, politik, dan sosial-budaya. *Kedua*, adanya komitmen yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. *Ketiga*, adanya ruang bagi partisipasi rakyat atau menjadikan rakyat sebagai subjek demokrasi.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu mata pelajaran di Sekolah Dasar yang memiliki tugas profesional untuk membina siswa agar menjadi generasi penerus yang dalam konteks pembinaan generasi muda menjadi seorang warganegara dewasa. Anak adalah warganegara hipotetik, yakni warganegara yang “belum jadi” karena masih harus dididik menjadi warganegara dewasa yang sadar akan hak dan kewajibannya (Budimansyah, 2007:11). Oleh karena itu masyarakat sangat mendambakan generasi mudanya dipersiapkan untuk menjadi warganegara yang baik dan dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan negaranya. Keinginan tersebut lebih tepat disebut sebagai perhatian yang terus tumbuh, terutama dalam masyarakat demokratis. Banyak sekali bukti yang menunjukkan bahwa tak satu pun negara, termasuk Indonesia, telah mencapai tingkat pemahaman dan penerimaan terhadap hak-hak dan tanggung jawab di antara keseluruhan warganegara untuk menyokong kehidupan demokrasi konstitusional. Seluruh rakyat hendaknya menyadari bahwa PKn sangat penting untuk mempertahankan kelangsungan demokrasi konstitusional. Sebagaimana yang selama ini dipahami bahwa ethos demokrasi sesungguhnya tidaklah diwariskan, tetapi dipelajari dan dialami. Sebagaimana ditegaskan Alexis de Toqueville (Branson, 1998:2).

Setiap generasi adalah masyarakat baru yang harus memperoleh pengetahuan, mempelajari keahlian, dan mengembangkan karakter atau watak publik maupun privat yang sejalan dengan demokrasi konstitusional. Sikap mental ini harus dipelihara dan dipupuk melalui perkataan dan pengajaran serta kekuatan keteladanan. Demokrasi bukanlah “mesin yang akan berfungsi dengan sendirinya”, tetapi harus selalu secara sadar direproduksi dari suatu generasi kegenerasi berikutnya. Oleh karena itu, PKn seharusnya menjadi perhatian utama. Tidak ada tugas

yang lebih penting dari pengembangan warganegara yang bertanggung jawab, efektif dan terdidik. Demokrasi dipelihara oleh warganegara yang mempunyai pengetahuan, kemampuan dan karakter yang dibutuhkan. Tanpa adanya komitmen yang benar dari warganegara terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi, maka masyarakat yang terbuka dan bebas, tak mungkin terwujud. Oleh karena itu, tugas bagi para pendidik, pembuat kebijakan, dan anggota civil society lainnya, adalah mengkampanyekan pentingnya PKn kepada seluruh lapisan masyarakat dan semua instansi dan jajaran pemerintahan.

Berdasarkan berbagai hal diatas seharusnya kandidat *incumbent* lebih mempunyai peluang besar untuk mendapat simpati dari pemilih yang akhirnya berujung pada jatuhnya pilihan seorang pemilih untuk memilih kandidat *incumbent* tersebut. Dalam hal ini tentu jelas seharusnya kandidat *Incumbent* dapat terpilih kembali pada pemilu legislatif tahun 2014, namun yang terjadi sebagian besar kandidat *incumbent* tersebut tidak terpilih kembali pada pemilu legislatif tahun 2014. Dari penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Peran Dosen Program Studi PPKn Dalam Mengembangkan Budaya Demokrasi Pancasila Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019”.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2003:3), bahwa: “ penelitian kualitatif merupakan proedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang perilaku yang diamati”. Penelitian kualitatif berakar pada latar belakang alami sebagai keutuhan, mengandalkan analisis secara induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha untuk menemukan teori dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan focus ,memiliki seperangkat criteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitian bersifat sementara, dan hasil penelitiannya disepakati kedua belah pihak yaitu penelitian dan subjek penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik.

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di kampus IKIP-PGRI Pontianak khususnya Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial yang beralamat di jalan Ampera. Dalam penelitian ini yang akan menjadi subjek penelittiannya adalah Dosen Program Studi PPKn, Mahasiswa PPKn dan pengurus himpunan mahasiswa PPKn. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung, komunikasi langsung dan dokumentasi. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah panduan wawancara, panduan observasi dan dokumen. Validitas data menggunakan teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik

analisis data menggunakan deskriptif dengan tahapan analisis, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini merupakan deskripsi dan rangkuman studi wawancara, dokumentasi, dan observasi yang dilakukan selama penelitian berlangsung. Deskripsi dan interpretasi data yang diperoleh dengan kajian teoritis. Deskripsi dimaksudkan untuk menuangkan data objektif tentang segala sesuatu yang diamati dan didengar, tanpa diwarnai oleh pandangan atau tafsir peneliti mengenai Peran Dosen Program Studi PPKn Dalam Mengembangkan Budaya Demokrasi Pancasila Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 sebagai berikut:

### Budaya Demokrasi Pancasila Pada Mahasiswa Program Studi PPKn

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa budaya demokrasi yang di implementasikan Mahasiswa Program Studi PPKn IKIP-PGRI Pontianak yaitu: memiliki kepribadian demokratis, menjunjung tinggi toleransi, kebebasan mengemukakan pendapat, menghormati perbedaan pendapat, terbuka terhadap ide-ide baru, memiliki kebersamaan, mengutamakan kepentingan mahasiswa, memiliki semangat nasionalisme yang kuat. Hal tersebut senada dengan pendapat Cholis (2013:91) yang mengemukakan mengenai karakter warga negara yang demokratis yaitu: (1) warga negara yang memiliki kepribadian demokratis; (2) berbudaya politik partisipan; (3) sebagai *generator citizen*; (4) mengutamakan kepentingan publik; (5) memiliki nasionalisme yang kuat. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan menjelaskan hasil temuan terkait dengan wujud budaya demokrasi pancasila yang di Implementasikan mahasiswa Program Studi PPKn IKIP-PGRI Pontianak sebagai berikut:

### Memiliki Sikap Demokratis

Kepribadian demokratis merupakan bentuk sikap yang penuh *tepo seliro* (toleransi) perilaku seseorang selalu memperhitungkan orang lain. Memiliki kepribadian demokratis merupakan bentuk kepribadian yang sangat diperlukan dalam pembangunan demokrasi. Menurut Zamroni, (2015:111) Masyarakat yang memiliki kultur dan nilai-nilai demokrasi, seperti:

- a. Toleransi,
- b. Menghormati perbedaan pendapat
- c. Memahami dan menyadari keanekaragaman masyarakat
- d. Terbuka dalam komunikasi
- e. Menjunjung tinggi nilai-nilai manusia
- f. Mampu mengekang diri sehingga tidak mengganggu orang lain
- g. Saling menghargai.

Sejalan dengan pendapat diatas ini (Ketua HIMA PPKn) mengatakan bahwa:

“Wujud Kepribadian demokratis yang selama ini di implemetasikan mahasiswa dan anggota HIMA PPKn sudah baik, menurutnya HIMA PPKn selalu melakukan musyawarah untuk mufakat sebelum melaksanakan kegiatan, hal ini dimulai dari menentukan tempat, waktu, bahkan tema dari suatu kegiatan. budaya 5S yaitu, Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun, merupakan budaya yang dibudayakan oleh pengurus dan mahasiswa PPKn”.

Berdasarkan observasi, peneliti melihat bahwa pengurus mahasiswa PPKn Sudah memiliki kepribadian demokratis, hal tersebut terlihat dimana mahasiswa PPKn memiliki sikap hangat pada orang lain, hal tersebut mereka implementasikan dengan membudayakan basa-basi, dan tegur sapa ketika bertemu dengan dosen dan sesama mahasiswa, mahasiswa tetap saling menghormati setiap perbedaan dalam memilih calon presiden dan wakil presiden.

Mahasiswa PPKn yang berkepribadian demokratis dapat tercermin dengan sikap: ramah, mudah menyesuaikan diri, mau menerima pendapat orang lain dan menghargai setiap perbedaan dalam menentukan pilihan baik anggota dewan, Presiden Dan Wakil Presiden.

### **Memiliki Sikap toleransi**

Menurut Poerwadarminta, (1976: 829). Toleransi menurut istilah berarti menghargai, membolehkan, membiarkan pendirian pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang lain atau yang bertentangan dengan pendirinya sendiri, misalnya agama, Ideologi, Ras. Pelaksanaan sikap toleransi ini harus didasari dengan sikap kelapangan dada terhadap orang lain dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang dipegang sendiri, yakni tanpa mengorbankan prinsip-prinsip tersebut (Daud Ali, 1989:83). Jelas bahwa toleransi terjadi dan berlaku karena terdapat perbedaan prinsip, dan menghormati perbedaan atau prinsip orang lain tanpa mengorbankan prinsip sendiri.

Berkaitan dengan hal tersebut cuplikan hasil wawancara dengan sabani (Mahasiswa) mengatakan bahwa: “Wujud nilai budaya di pada mahasiswa sudah dilakukan dan pelaksanaannya menurutnya sudah baik, bentuknya diwujudkan dengan sikap toleransi terhadap satu sama lain dimana selama kegiatan HIMA PPKn kita selalu ditanamkan untuk menghargai perbedaan”.

Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti, peneliti melihat bahwa mahasiswa PPKn sudah mencerminkan sikap toleransi, Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana penghargaan terhadap perbedaan dimana dengan perbedaan suku, agama, diantara mahasiswa PPKn namun kekompakan dan kebersamaan anantara pengurus tetap terjalin dan terdapat ruang kebebasan mengemukakan pendapat dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan organisasi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sikap Toleransi merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh mahasiswa PPKn, yang dapat diwujudkan melalui sikap, menghargai perbedaan

suku, ras, dan agama, termasuk perbedaan sudut dan pendapat dalam konteks pemilu serentak tahun 2019.

### **Kebebasan Mengemukakan Pendapat**

Kebebasan mengemukakan pendapat merupakan nilai budaya demokrasi yang tidak bisa dilepaskan menurut Chamim, dkk, (dalam Winarno, 2013: 112) bahwa nilai budaya demokrasi yang diperlukan untuk mengembangkan budaya demokrasi antara lain: kebebasan berpendapat, berkelompok, dan berpartisipasi. Oleh karena itu setiap individu memiliki hak untuk mengemukakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, adanya kebebasan mengeluarkan pendapat hendaknya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Menurut Ari (Ketua Hima PPKn) mengatakan “Selama ini ruang kebebasan berpendapat di HIMA PPKn selalu dibuka dengan mengundang pengurus hadir dalam rapat pengurus untuk menentukan keputusan” Sejalan dengan pendapat diatas menurut menurut Sabani (Mahasiswa PPKn Semester I) mengatakan bahwa:

“Kebebasan mengemukakan pendapat sudah dilakukan mahasiswa dan HIMA PPKn rapat, dimana membuka ruang kesempatan mengemukakan pendapat, bentuk pengambilan keputusan secara bermusyawarah tidak mengambil keputusan menggunakan pendapat sendiri,”

Berdasarkan pendapat diatas dapat dimaknai bahwa kebebasan berpendapat merupakan suatu bentuk wujud sikap yang dimiliki oleh Mahasiswa PPKn. dalam pelaksanaan budaya demokrasi di mahasiswa PPKn PPKn kebebasan berpendapat diwujudkan melalui kegiatan diskusi, dialog, rapat pengurus, semua diberikan ruang dan kesempatan menyampaikan ide dan gagasannya dalam konteks perkuliahan maupun konteks pilihan dalam pemilu tahun 2019.

### **Menghormati Perbedaan Pendapat**

Menurut Zamroni, (2015: 111) bahwa pada dasarnya bahwa warga negara yang demokratis memiliki kultur dan nilai budaya demokrasi. Menghormati perbedaan pendapat merupakan salah satu nilai budaya demokrasi yang perlu dimiliki. Sejalan dengan pendapat diatas menurut pendapat aing (Mahasiswa) mengatakan bahwa: “Selama ini pengurus HIMA PPKn mau membaur dan menerima masukan dari teman yang lain, namun ada juga yang egois dalam memakai pendapatnya sendiri”. Sejalan dengan Pendapat diatas menurut Sabani (Mahasiswa PPKn) mengatakan bahwa sikap menghargai perbedaan berpendapat diwujudkan dalam pelaksanaan mahasiswa baik dalam rapat pengurus HIMA PPKn, kegiatan perkuliahan dimana perbedaan pendapat tadi diputuskan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dimaknai bahwa menghagai perbedaan pendapat merupakan wujud nilai budaya demokrasi yang di sudah di implementasikan mahasiswa PPKn dan sikap saling menghargai dan menerima masukan dan pendapat dari orang lain.

### **Mengutamakan Kepentingan Publik**

Mengutamakan kepentingan publik merupakan suatu sikap yang mementingkan kepentingan orang ramai diatas kepentingan pribadi, Sikap mengutamakan kepentingan umum merupakan sikap seseorang untuk menghargai atau menghormati orang lain yang dirasakan lebih membutuhkan atau penting dalam suatu kurun waktu tertentu untuk sesuatu yang lebih besar manfaatnya.

Sejalan dengan pendapat diatas menurut Moad, M.Pd mengatakan bahwa:

“ Wujud sikap yang mengutamakan kepentingan publik merupakan suatu keharusan, menurutnya demokrasi itu merupakan suasana dimana setiap keputusan dan sikap yang diambil dan diputuskan harus mendengarkan aspirasi dari mahasiswa yang lain, dengan prinsip mengutamakan kepentingan orang ramai dibanding kepentingan pribadinya”.

Berkaitan dengan tersebut dalam pelaksanaan budaya demokrasi mahasiswa PPKn, sikap yang mengutamakan kepentingan publik sudah dilakukan dimana mahasiswa sudah melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, misalnya saja ketika mengadakan rapat, terdapat beberapa pengurus yang rela mengorbankan kepentingan pribadinya.

### **Memiliki Semangat Nasionalisme**

Makna nasionalisme secara politis merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya. Kita sebagai warga negara Indonesia, sudah tentu merasa bangga dan mencintai bangsa dan negara Indonesia. Kebanggaan dan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara tidak berarti kita merasa lebih hebat dan lebih unggul daripada bangsa dan negara lain. Kita tidak boleh memiliki semangat nasionalisme yang berlebihan (*chauvinisme*) tetapi kita harus mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Menurut Ari (Ketua HIMA PPKn) mengatakan sikap nasionalisme yang ditunjukkan pengurus HIMA PPKn yaitu: “Pengurus HIMA PPKn selama ini menanamkan rasa nasionalisme dengan membangun kesadaran mahasiswa melalui kegiatan bagi-bagi stiker dan selebaran pada hari-hari besar”. Sejalan dengan pendapat diatas menurut wilna (Mahasiswi PPKn) mengatakan bahwa, kontribusi yang dilakukan mahasiswa dan anggota HIMA PPKn dalam



mengingatkan hari-hari besar yaitu membagikan stiker dan selebaran yang mengingatkan arti penting hari bersejarah tersebut.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dimaknai bahwa dalam upaya penanaman rasa nasionalisme pada mahasiswa PPKn sudah dilakukan dengan kesadaran akan pentingnya rasa nasionalisme, hal tersebut dilakukan dengan bentuk pembagian stiker, maupun selebaran. Pelaksanaan penanaman kesadaran akan nasionalisme merupakan wujud nilai budaya demokrasi yang di implementasikan mahasiswa PPKn.

### **Peran Dosen Program Studi PPKn Dalam Mengembangkan Budaya Demokrasi Pancasila Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa peran dosen dalam mengembangkan budaya demokrasi pancasila pada mahasiswa Program Studi PPKn dikukan dengan: (1) Memberikan pengetahuan dan Pemahaman akan pentingnya budaya demokrasi pancasila. (2) mengembangkan model pembelajaran demokratis; (3) mengembangkan sikap kebebasan mengemukakan pendapat; (4) mengembangkan sikap kebebasan untuk berpartisipasi; (5) mengembangkan sikap toleransi; (6) mengembangkan sikap saling menghormati; (7) mengembangkan sikap patuh dan taat pada hukum.

### **Pemahaman Budaya Demokrasi Pancasila**

Menurut Sumantri (dalam Winataputra, 2012: 103) disebut "*undemocratic democracy*". Yakni suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang struktur (institusi) demokrasi sudah ada, tetapi semangat perwujudan masih jauh dari cita-cita. Sejalan dengan pendapat diatas Menurut Winataputra (2012:103) diakibatkan oleh masyarakat yang masih belum mempunyai pemahaman yang benar tentang sistem demokrasi itu sendiri. Pemahaman yang benar merupakan keharusan ditanamkan untuk efektivitas pelaksanaan budaya demokrasi.

Berdasarkan paparan diatas dapat dimaknai bahwa pemahaman akan demokrasi merupakan keharusan dimiliki dan dikembangkan oleh mahasiswa PPKn, karena salah satu faktor yang mendukung demokrasi itu berkembang bagaimana pemahaman masyarakat tentang demokrasi, hak dan kewajibanya dalam demokrasi, sehingga mampu, dan mau, hidup demokratis tetapi juga mengembangkan demokrasi itu sendiri.

### **Mengembangkan Model Pendidikan Demokrasi**

Winataputra (2002: 126) menyatakan bahwa pendidikan demokrasi merupakan upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk warga negara supaya dapat memahami, menghayati, mengamalkan dan mengembangkan seluruh konsep, prinsip dan nilai dalam demokrasi sesuai dengan status dan peranannya dalam masyarakat. Menurut Unesco (Taniredja,

2013: 155) mengungkapkan bahwa pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah pendidikan untuk mengembangkan eksistensi manusia melalui rasa saling mempercayai, toleransi, penghargaan pada kepercayaan dan kebudayaan orang lain, penghormatan pada individualitas, peran serta aktif dalam semua aspek kehidupan sosial, kebebasan berekspresi, kepercayaan dan peribadatan.

Bentuk-bentuk pelaksanaan pendidikan demokrasi dalam proses perkuliahan yaitu mengembangkan sikap demokratis mahasiswa dalam kegiatan diskusi, memberikan kebebasan mahasiswa dalam menyatakan pendapat dan kritikan, mengembangkan variasi dalam mengajar, menggunakan media dan sumber belajar yang dapat meningkatkan sikap demokratis mahasiswa, dan mengembangkan sikap adil dan toleransi.

Model pendidikan demokrasi yang dikembangkan oleh Dosen Prodi PPKn bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta sikap pada mahasiswa untuk aktif berpartisipasi dalam pemilu, memberikan hak suaranya pada calon yang dipilih, memberikan kebebasan dalam menyatakan pendapat dan harapan terhadap calon anggota dewan dan capres serta cawapres dalam pemilu serentak.

### **Mengembangkan Kebebasan Berpendapat**

Sejalan dengan undang-undang dasar 1945 membarikan jaminan konstitusional terhadap kemerdekaan mengemukakan pendapat. Dalam pasal 28 UUD 1945, dinyatakan secara tegas bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Kemudian dalam pasal 28E ayat (3) menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Kedua pasal tersebut membuktikan bahwa UUD 1945 memberikan jaminan bahwa mengemukakan pendapat adalah hak asasi yang dijamin oleh undang-undang.

Menurut Ari mardiansah “Faktor Pendukung dalam budaya demokrasi di HIMA salah satunya ruang kebebasan berpendapat yang selalu dibuka dengan mengundang pengurus hadir dalam rapat pengurus untuk menentukan keputusan” Sejalan dengan pendapat diatas menurut Sabani beliau mengatakan bahwa: “Faktor yang mendukung pelaksanaan budaya demokrasi adalah ruang kebebasan berdemokrasi yang disiapkan oleh HIMA kepada pengurus dan mahasiswa PPKn”.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dimaknai bahwa kebebasan berpendapat merupakan suatu faktor yang mendukung pelaksanaan budaya demokrasi. Sejalan dengan itu ruang kebebasan berpendapat memang seharusnya dilakukan dalam kegiatan perkuliahan maupun melalui kegiatan pembelajaran di kelas dan kegiatan organisasi HIMA PPKn. Dalam konteks pemilu serentak

tahun 2019, mahasiswa diharuskan memiliki kebebasan dalam menyatakan pendapat dan kritikan terhadap calon anggota dewan, calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan dipilih.

### **Mengembangkan sikap untuk berpartisipasi aktif**

Subakti, (1999:140), Mengemukakan partisipasi adalah keikutsertaan Warga Negara atau masyarakat biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik dalam Negara demokratis sangatlah penting, tanpa adanya partisipasi dari masyarakat tidak akan berjalan dengan baik suatu pemerintahan. Herbert (dalam Budiarto, 1998:2), mendefinisikan konsep partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui bagaimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembuatan kebijakan umum.

Menurut (Merphyn Panjaitan, 2000:8), mengatakan bahwa demokrasi berhubungan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat. Semakin tinggi partisipasi politik masyarakat, maka semakin tinggi kadar Demokrasi Negara tersebut. Huntington, Almond (dalam Mas'ood dan Andrews, 1997:48), juga mengemukakan ada dua bentuk partisipasi politik yang dilakukan masyarakat yakni partisipasi politik konvensional yang meliputi: Pemberian suara, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan, komunikasi individu dengan pejabat politik dan administratif. Sedangkan partisipasi politik non konvensional seperti pengajuan potensi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, tindak kekerasan politik manusia serta perang dan gerilya.

Menurut Wilna (mahasiswa) mengungkapkan bahwa bentuk partisipasi aktif yang dilakukan kita adalah berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, dialog, aktif dalam kegiatan organisasi himpunan, berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan ketua Hima dan BEM dan berpartisipasi aktif dalam memberikan suara dalam pemilihan. Dalam konteks pemilu, sebagai mahasiswa ikut berpartisipasi dalam memberikan suara kepada calon dewan dan Capres. Hal serupa disampaikan oleh Maria Eva (Mahasiswa) bahwa dalam mengembangkan budaya demokrasi, dosen memberikan kebebasan dalam menentukan pilihan Presiden dan Wakil Presiden, memberikan kebebasan kepada mahasiswa dalam berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.

### **Mengembangkan sikap bertoleransi**

Sikap toleransi merupakan pendukung budaya demokrasi dikembangkan. Toleransi merupakan suatu sikap yang menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak setiap individu, baik hak beribadat sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, hak untuk mengemukakan pendapat, hak menjalin hubungan sosial dimasyarakat maupun hak-hak yang lain.

Sejalan dengan pendapat diatas Menurut Poerwadarminta, (1976: 829). Toleransi menurut istilah berarti menghargai, membolehkan, membiarkan pendirian pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang lain atau yang bertentangan dengan pendirinya sendiri, misalnya agama, Ideologi, Ras.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dimaknai bahwa toleransi merupakan sikap yang mendukung pelaksanaan budaya demokrasi. Sikap toleransi perlu dimiliki dan dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, sikap toleransi dapat dilihat dari bagaimana penghargaan terhadap perbedaan dimana dengan perbedaan suku, agama, dianatara mahasiswa PPKn, selain itu mengembangkan sikap untuk saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan pendapat.

## **SIMPULAN**

Secara umum penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Budaya demokrasi pancasila pada Mahasiswa PPKn IKIP-PGRI Pontianak dalam pemilu serentak tahun 2019 tercermin dalam bentuk sikap dan perilaku yaitu: (1) sikap demokratis, diwujudkan melalui semangat berpartisipasi aktif dalam pemilu serentak, kebebasan dalam menentukan pilihan calon Presiden dan Anggota dewan dan adanya dialog terbuka dalam menyampaikan gagasan, ide, dan program kerja salah satu paslon Presiden; (2) mengembangkan sikap toleransi, diwujudkan melalui sikap menghargai perbedaan suku, ras, dan agama, termasuk perbedaan sudut pandang dan pendapat dalam kegiatan diskusi kelas, rapat organisasi dan menentukan salah satu paslon Presiden; (3) Sikap menghormati dalam Kebebasan mengemukakan Pendapat, ditunjukan dengan selalu memberikan kesempatan untuk menyampaikan ide, gagasan, kritikan dan saran dalam kegiatan proses perkuliahan dan hak menentukan paslon dalam pemilu; (4) mengembangkan jiwa dan semangat kebersamaan, dengan menciptakan suasana kekeluargaan dan hubungan yang harmonis dengan dosen dan sesama mahasiswa serta semangat bersama dalam membangun bangsa ini dalam pemilu serentak; (5) lebih mengutamakan kepentingan publik, hal ini diwujudkan dengan sikap untuk lebih mementingkan tugas kuliah, tugas kelompok, aktif dalam kegiatan rapat organisasi serta lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks pemilu; (6) sikap Nasionalisme yang ditunjukan dengan cinta kepada bangsa Indonesia, bangga sebagai warganegara dan mahasiswa Prodi PPKn, dalam kegiatan rapat dan kegiatan organisasi selalu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, serta semangat persatuan dan kesatuan bagi seluruh mahasiswa yang mendukung salah satu paslon Presiden dan wakil presiden

Peran dosen dalam mengembangkan budaya demokrasi pancasila pada mahasiswa Program Studi PPKn dikukan dengan: (1) memberikan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya demokrasi pancasila dengan cara penguatan nilai-nilai demokrasi pancasila dalam

kegiatan pembelajaran di kelas dengan menciptakan suasana kelas yang demokratis; (2) mengembangkan sikap kebebasan mengemukakan pendapat, dengan cara memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa untuk menyampaikan ide, gagasan, kritikan dan saran baik dalam kegiatan diskusi, rapat organisasi mahasiswa, dan dialog terbuka tentang pemilu serentak; (4) mengembangkan sikap kebebasan untuk berpartisipasi, dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menentukan kelompok diskusi, melaksanakan tugas kuliah, dan penguatan partisipasi mahasiswa baik dalam kegiatan pemilihan ketua organisasi mahasiswa maupun pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden; (5) mengembangkan sikap toleransi, dilakukan dengan menghormati dan menghargai setiap perbedaan baik ras, suku dan agama serta tidak membedakan, sikap menghormati setiap perbedaan pilihan dalam pemilu serentak; (6) mengembangkan sikap saling menghormati, dilakukan dengan menghargai dan menghormati perbedaan pendapat dalam diskusi dan tugas kuliah, serta menjunjung tinggi hak setiap mahasiswa dalam menentukan pilihan, baik dalam pemilihan ketua himpunan mahasiswa ataupun dalam pemilu; (7) mengembangkan sikap patuh dan taat pada hukum, dilakukan dengan cara memberikan penguatan tentang etika dan tata tertib kampus, memberikan sanksi bagi mahasiswa yang melanggar aturan kampus serta penguatan dalam menangkal Hoax dalam konteks pemilu serentak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Idrus dan Leni A (2011). *Pendidikan Politik* (Sebuah Kajian dan Analisis). Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia dan Penerbit Lensa Media Pustaka Indonesia
- Affandi, Idrus (2011). *Pendidikan Politik* Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia dan Penerbit Mutiara Press
- Budiarjo, M. (1998). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama,
- Basrowi, dkk (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Branson, M.S. (1998). *The Role of Civic Education*, A Forcoming Education Policy Task Force Position Paper From the Communitarian Network.
- Cholisin (2013) *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Yogyakarta: Ombak
- Darmadi, Hamid (2012). *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta
- Fuady, Munir (2010). *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: PT Refika Aditama
- Gatara, Sahid (2009). *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*. Bandung: Pustaka Setia
- Huntington ,S. dan Nelson, Joan, (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Rineka Cipta, Jakarta
- IKIP-PGRI Pontianak (2011) *Pedoman Operasional Akademik 2014-2015*. Pontianak
- Fusnika, (2014). JPIS, *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Volume 23, No 1 Edisi Juni
- Kaelan, dan Zubaidi (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Paradigma

- Koesoema, D. A. (2009), *Pendidik Karakter di Zaman Keblinger: mengembangkan Visi Guru Sebagai pelaku Perubahan dan Pendidik Karakter*. Jakarta:Grasindo.
- Merphin Panjaitan. (2001). *Gerakan Warga Negara Menuju Demokrasi*. Jakarta,
- Megawangi, R (2004:95), *Pendidikan karakter Solusi Yang Tepat Untuk Membangun Bangsa*, Jakarta: BPMIGAS dan Star Energi
- Miles, B. Matthew dan Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Pers).
- Moleong. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Offset. Bandung.
- Mufti, dan Naafisah, (2013), *Teori-Teori Demokrasi*. Bandung; Pustaka Setia
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Winataputra, U. S. (2002). *Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Zamroni. (2002). *Demokrasi dan Pendidikan Dalam Transisi: Perlunya Reorientasi Pengajaran Ilmu -Ilmu Sosial di Sekolah Menengah*. Pidato Pengukuhan Guru Besar pada FIS UNY Yogyakarta: tidak diterbitkan